



**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI KELAS II**

RENCANA AKSI KINEJA Tahun 2025



 pn.pangkalanbalai@gmail.com

 Jl. Perkantoran Pemkab, Kedondong Raya, Kec.
Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30911

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : 6/KPN.W6-U6/RA1.5/I/2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	92 %	92	92	92	92

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 3 bulan	X	X	X	X	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perdata	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Beperkara
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	X	X	X	X	Terdata jumlah perkara perdata yang lebih dari 3 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	X	X	X	X	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	X	X	X	X	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 bulan	X	X	X	X	Perkara perdata yang diputus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	X	X	X	X	Perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7.	Melaporkan kepada KPN perkara yang melebihi batas waktu	X	X	X	X	Laporan perkara lebih dari 3 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	100 %	100	100	100	100

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 3 bulan	X	X	X	X	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 123.990.000
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	X	X	X	X	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 3 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	X	X	X	X	Terlakasanya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama	X	X	X	X	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

	(maksimal 2 minggu)						Hukum		
5.	Memutus perkara pidana tidak melebihi 3 bulan	X	X	X	X	Perkara pidana yang diputus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Melaporkan kepada KPN perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	X	X	X	X	Perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	2. Jumlah Putusan yang menggunakan pendektan Keadilan Restoratif	10 %	10	10	10	10

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Hakim melaksanakan mediasi dan dialog kepada para pihak berperkara (khusus perkara pidana) dengan tujuan, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.	X	X	X	X	Pelaksanaan Mediasi dan dialog kepada para pihak berperkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 123.990.000

2.	Adanya kesepakatan antara pihak berperkara untuk berdamai	X	X	X	X	Terlaksananya kesepakatan damai	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif	X	X	X	X	Putusan yang mencantumkan penyelesaian dengan restoratif justice	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	3. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %	95	95	95	95

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Majelis hakim melakukan musyawarah secara optimal sebelum memutus perkara banding	X	X	X	X	Terlaksananya Musyawarah Majelis Hakim	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 123.990.000
2.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tingkat Pertama	X	X	X	X	Terlaksananya Pendataan perkara Pidana dan Perdata yang tidak melakukan Upaya Hukum Banding	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	3. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	85 %	85	85	85	85

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Majelis hakim melakukan musyawarah secara optimal sebelum memutus perkara kasasi	X	X	X	X	Terlaksananya Musyawarah Majelis Hakim	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 123.990.000
2.	Mendata Perkara yang tidak melakukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan tingkat pertama	X	X	X	X	Terdatanya Perkara Pidana dan Perdata yang tidak melakukan Upaya Hukum Kasasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	4. Perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	90 %	90	90	90	90

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Hakim melaksanakan mediasi dan dialog kepada para pihak berperkara (khusus perkara pidana anak) dengan tujuan, untuk mengupayakan perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak	X	X	X	X	Mediasi dan dialog kepada para pihak berperkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 372,301,000
2.	Adanya kesepakatan antara pihak berperkara untuk berdamai	X	X	X	X	Terlaksananya kesepakatan damai antara kedua belah pihak	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

3.	Hakim mengupayakan diversi	X	X	X	X	Terlaksananya Proses Kesepakatan damai	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan diversi	X	X	X	X	Penetapan Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	5. Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan	100 %	100	100	100	100

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	X	X	X	X	Terbentuknya Tim Survey	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 123.990.000
2.	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	X	X	X	X	Job Description Tim SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	X	X	X	X	Jadwal dan Perangkat SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	X	X	X	X	Kuesioner SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

5.	Mendata dan merekap hasil SKM	X	X	X	X	Data Hasil SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Menyusun Laporan Hasil SKM			X		Laporan SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey			X		Laporan tindak lanjut hasil survey	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektifas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Pengiriman putusan Perkara Perdata kepada para pihak secara tepat waktu	100 %	100	100	100	100

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	X	X	X	X	Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
2.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	X	X	X	X	Data Putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	X	X	X	X	e-doc Salinan Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

4.	Mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan putusan ke SIPP	X	X	X	X	Dokumen Salinan putusan dan Tanggal Salinan putusan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	X	X	X	X	Hasil Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET			
				I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektifas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Pengiriman putusan Perkara Pidana kepada para pihak secara tepat waktu	100 %	100	100	100	100

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	X	X	X	X	Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.123.990..000
2.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	X	X	X	X	Data Putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	X	X	X	X	e-doc Salinan Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput	X	X	X	X	Dokumen Salinan putusan dan Tanggal Salinan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

	tanggal pengiriman Salinan putusan ke SIPP.					putusan.			
5.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	X	X	X	X	Hasil Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektifas pengelolaan penyelesaian perkara	2. Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi	14 %	14	14	14	14

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Hakim melaksanakan mediasi dan dialog kepada para pihak berperkara (khusus perkara perdata gugatan) dengan tujuan, untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak	X	X	X	X	Terlaksananya Mediasi dan dialog kepada para Pihak Berperkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana Bersumber dari Biaya proses Pihak Berperkara
2.	Adanya kesepakatan antara pihak berperkara untuk berdamai	X	X	X	X	Terlaksananya Kesepakatan damai antara pihak Berperkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan akta perdamaian	X	X	X	X	Penerbitan Akta damai yang ditanda tangani oleh Ketua PN	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Pemberian layanan bantuan hukum (posbakum) epada masyarakat golongan tertentu	100 %	100	100	100	100

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melaksanakan MOU kepada Lembaga Bantuan Hukum	X				Terlaksananya MOU antara Pengadilan dan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	28.000.000
2.	Menyiapkan ruangan dan sarana prasarana penunjang POSBAKUM	X				Tersedianya Ruangan Posbakum di area PTSP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	28.000.000
3.	Menetapkan jadwal Piket petugas POSBAKUM	X	X	X	X	Jadwal Piket Posbakum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	28.000.000
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja POSBAKUM	X	X	X	X	Laporan Posbakum Setiap Bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	28.000.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Tahunan	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40 %	40	40	40	40

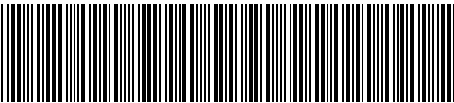
NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Rapat koordinasi tindak lanjut permohonan eksekusi	X	X	X	X	Terlaksananya Rapat Koordinasi Eksekusi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	123.990.000
2.	Pelaksanaan eksekusi dengan melibatkan pihak-pihak terkait	X	X	X	X	Terlaksananya Kegiatan Eksekusi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Pangkalan Balai, 2 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.402017/2025**

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 - 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 - 4. Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 - Sebesar : Rp. 151.990.000 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang
Rp. 151.990.000
Rp. 151.990.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	151.990.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 151.990.000

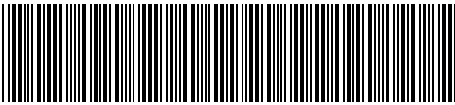
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4395-7860-1570-9529

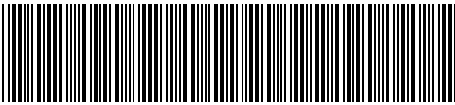
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

										Halaman : I A. 1	
Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							151.990.000	
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							151.990.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum								
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu								
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum								
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara								
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan								
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan				447,00	Perkara, Berkas Perkara		123.990.000	
Rincian Output	:	01	BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat			447.00	Perkara		123.990.000	
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				30,00	Orang		28.000.000	
Rincian Output	:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)			30.00	Orang		28.000.000	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
I B. SUMBER DANA



DS:4395-7860-1570-9529

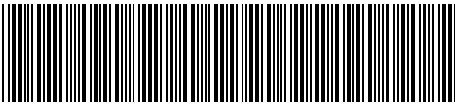
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	151.990.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	151.990.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

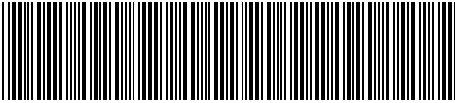
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	-	151.990	-	-	-	151.990	11 . 09	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	151.990	-	-	-	151.990		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	151.990	-	-	-	151.990		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	123.990	-	-	-	123.990		
01	RM	-	123.990	-	-	-	123.990		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	28.000	-	-	-	28.000		
01	RM	-	28.000	-	-	-	28.000	160	
JUMLAH		-	151.990	-	-	-	151.990		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

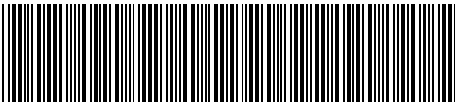
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		BELANJA BARANG	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.879	46.449
		- PNBP (425232)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
		- PNBP (425233)	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	359	4.275
005.03.BF.1049	- PNBP (425239)	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.440	41.214	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
IV A. B L O K I R



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

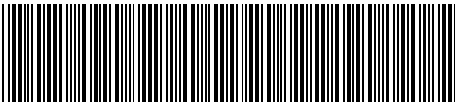
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.600 52 Belanja Barang Rp. 1.600		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(03)
(402017)
Rp. 151,990,000

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			151,990,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			151,990,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	447.0 Perkara, Berkas Perkara		123,990,000	

1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.0 Perkara		123,990,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			48,985,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			48,985,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan berkas perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			42,280,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat Tulis Kantor	447.0 PKR	94,587	42,280,000	
052	Penetapan hari sidang			35,760,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			35,760,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			35,760,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	447.0 KEG	80,000	35,760,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			20,940,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,940,000	
521211	Belanja Bahan			20,940,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Konsumsi Makan Terdakwa	447.0 OK	20,000	8,940,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	480.0 OK	25,000	12,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	60.0 KEG	40,000	2,400,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			6,705,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,705,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan Berkas Perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(03)
(402017)
Rp. 151,990,000

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			5,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,600,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			2,400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Banding	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			3,200,000	A
	- Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			1,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,200,000	RM
	- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 OK	80,000	400,000	
	- Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	30.0 Orang		28,000,000	
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	30.0 Orang		28,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			28,000,000	RM
	- Honorarium Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 10 BLN	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



Pangkalan Balai, 3 Desember 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Andrianto Fachrizal

ANDRIANTO FACHRIZAL,S.Kom

NIP 197612032011011005